

MODEL REGRESI PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN JUMLAH PENDUDUK PADA PROVINSI JAWA TIMUR (2018-2020)

Vinna Marlita Sari¹⁾, Mar'atus Solikah²⁾, Sugeng³⁾

Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Nusantara PGRI Kediri

1vinnamarlita1207@gmail.com, 2sayaikakediri@gmail.com, 3sugengprismakat@gmail.com

Informasi artikel :

Tanggal Masuk :10 Juli 2022

Tanggal Revisi :10 Agustus 2022

Tanggal diterima :11 September 2022

Abstract

This study uses a quantitative approach with the ex post facto method which aims to analyze and assess the impact of Regional Taxes, Regional Levies, and Populations on Regional Original Income in East Java Province in 2018–2020. Data analysis in this study used multiple linear regression using SPSS version 23 software. A total of 38 regencies and cities in East Java Province were sampled in this study. Regional Taxes, Regional Levies and Population Partially or Simultaneously affect Regional Original Income in East Java province. The latest data from the realization of Regional Original Income in 2018-2020 as well as a larger scope of research means that the Regency & City as a whole in East Java Province are used to update this research with previous research.

Keywords : Regional Taxes, Regional Levies, Population, Regional Original Income

Abstrak

Observasi ini memakai pendekatan kuantitatif dengan metode ex post facto yang berfungsi untuk menganalisis dan menilai dampak Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018–2020. Observasi ini memakai Regresi linier berganda dengan dukungan software SPSS versi 23. Sebanyak 38 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur menjadi sampel dalam observasi ini. Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Jumlah Penduduk secara Parsial maupun Simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur. Data terbaru dari realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2018-2020 serta cakupan observasi yang lebih besar artinya Kabupaten & Kota secara keseluruhan di Provinsi Jawa Timur digunakan untuk memperbaharui observasi ini dengan observasi sebelumnya.

Kata kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Pada kegiatan Pemerintahannya, Indonesia menganut asas desentralisasi. Desentralisasi berarti penyerahan wewenang dari pimpinan kepada bawahan, yang artinya kekuasaan pengelolaan Pemerintah Pusat diberikan sepenuhnya kepada Daerah masing-masing dalam manifestasi Otonomi Daerah, sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Setiap daerah berhak menjalankan pemerintahannya sendiri tunduk pada undang-undang yang legal dan kebijakan yang telah disepakati oleh masing-masing perangkat daerah. Adanya Otonomi Daerah memberi daerah kendali yang lebih besar atas bagaimana menjalankan urusan dalam daerahnya masing-masing. Pemerintah Daerah diharuskan kien tegas dalam penegakan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga dengan demikian hasil yang didapatkan dapat dialokasikan untuk menjadikan masyarakat adil, makmur dan sejahtera didalam perkembangannya. Perwujudan dari asas desentralisasi adalah adanya PAD yang menjadi sbagian dari sumber pendapatan daerah. Pendanaan kegiatan Otonomi Daerah bersumber dari PAD berdasarkan dengan kemampuan yang menjadi milik daerah masing-masing. PAD digunakan untuk mengembangkan perekonomian di daerah masing-masing. [3] Pendapatan yang didapat oleh pemerintah daerah dari sumbe daya yang ada di dalam kawasannya dan ditarik sebagaimana tertera dalam peraturan daerah yang berlaku.

Adanya wabah Covid-19 memberikan dampak yang buruk terhadap semua aspek di berbagai negara di dunia. Covid 19 ini memberikan dampak penurunan perekonomian pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur. Heru Tjajono menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengatakan bahwa "Totalnya dari Rp.35,1 triliun menjadi Rp.33,7 triliun, jadi ada penurunan sekitar Rp.1,4 triliun atau mengalami kontraksi sekitar 5 persenan". Kemerostan terjadi pada Pajak Derah dari sasaran awal yang direncanakan sebesar Rp 15 triliun turun hingga menjadi Rp 12 triliun. Penurunan Pajak Daerah paling bayak pada pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dampak dari melemahnya

kondisi Perekonomian menjadikan masyarakat untuk membeli Kendaraan Bermotor berkurang (<https://kominfo.jatimprov.go.id>). [9] luran wajib yang diberikan kepada suatu daerah tanpa imbalan langsung berupa imbalan yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pemerintahan serta pembangunan daerah. Menurut hukum Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dijelaskan bahwa tarikan dari daerah sebagai imbalan akan pelayanan atau penerbitan persetujuan tertentu yang secara eksklusif diterbitkan oleh pemerintah negara bagian untuk kebutuhan orang pribadi atau badan. [16] membuktikan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil observasi yang sama juga digarap oleh [8] yang menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara seiring memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi yang memiliki Jumlah Penduduk terbesar urutan kedua sesudah Provinsi Jawa Barat, dengan Jumlah Penduduk sebesar 39.955.900 jiwa pada tahun 2020 (<https://www.bps.go.id>). Menurut BPS (2013) keseluruhan orang yang berkedudukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang enam bulan atau lebih. atau orang yang bertempat di Indonesia kurang dari enam bulan tetapi berencana untuk tinggal di Indonesia. Besarnya angka Penduduk dapat berdampak pada Pendapatan Asli Daerah. Dengan bertambahnya Jumlah Penduduk dapat menambah *demand* atas konsumsi barang. Namun hal tersebut juga harus dibarengi dengan tingginya pendapatan masyarakat perorangan. Dalam kenyataannya, tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 terjadi peningkatan yaitu sebesar 300rb dari tahun 2019. Berdasarkan observasi yang dijalankan oleh [7] dikatakan bahwa Jumlah Penduduk memberikan pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Observasi atas kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Jumlah Penduduk pernah dijalankan oleh beberapa peneliti terdahulu yang menghasilkan hasil berbeda-beda. Observasi yang dijalankan oleh [10] dengan memakai metode analisis regresi dan korelasi sederhana menunjukkan bahwa Pajak Daerah yang ada sangat memberikan pengaruh terhadap perkembangan Pendapatan Asli Daerah Sangihe. Observasi atas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan hasil yang serupa juga digarap oleh [1] memakai metode deskriptif kualitatif yang menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memegang kendali penting atas Pendapatan Asli Daerah. Observasi mengenai Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah digarap oleh [7] dengan memakai metode analisis regresi diketahui Perkembangan Ekonomi dan Kependudukan memberikan pengaruh positif serta signifikan atas Pendapatan Asli Daerah.

Besarnya jumlah penduduk di Jawa Timur dengan tingkat pengangguran yang tinggi pula membuat peneliti tertarik untuk melakukan observasi. Selain itu menurunnya anggaran yang mana sumber terbanyak berasal dari pajak daerah yaitu dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor juga menjadi alasan dilakukannya penelitian ini. Sesuai dengan yang telah dijelaskan Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari beberapa faktor, sehingga untuk jumlah Pendapatan Asli Daerah setiap tahun dan setiap daerah own juga berbeda-beda. Dengan demikian peneliti tertarik melakukan observasi dengan judul "Model Regresi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Jumlah Penduduk pada Provinsi Jawa Timur (2018-2020) dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur secara parsial dan simultan.

METODE

Observasi ini memakai teknik pendekatan Kuantitatif untuk menganalisis beberapa titik data dengan memakai teknik regresi linier. Observasi digarap di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur dengan mempergunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK, Kementerian Keuangan). Observasi ini memakai sampel jenuh, sehingga banyak sampel yang digunakan adalah 114 yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota selama tiga tahun mulai tahun 2018-2020.

HASIL OBSERVASI DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif berfungsi untuk menganalisis data dengan teknik menggambarkan atau menjelaskan data yang dikumpulkan. Dari hasil pengujian Analisis Deskriptif yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui gambaran jumlah, rata-rata, nilai minimum dan nilai maximum dari setiap variabel yang digunakan dalam observasi. Diketahui jumlah data yang digunakan sebanyak 114 sampel. Rata-rata penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Jawa Timur selama 3 tahun sebesar 247.171.371.275, dengan nilai terendah Pajak Daerah sebesar 21.997.977.280 dan nilai tertinggi Pajak Daerah sebesar 4.018.722.251.948. untuk Retribusi Daerah rata-rata penerimaan selama 3 tahun sebesar 34.383.326.160 dengan nilai terendah sebesar 4.609.203.736 dan nilai tertinggi sebesar 4.609.203.050. Selanjutnya untuk Jumlah Penduduk rata-rata Jumlah Penduduk sebesar 1.035.266, Jumlah Penduduk terendah sebesar 128.282 dan Jumlah Penduduk tertinggi sebesar 2.896.195.

Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi guna mengetahui apakah variabel bebas berdistribusi normal dengan variabel terikat. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan dalam uji normalitas ini. Penyebaran data dilihat dengan cara membandingkan data antara

hasil Z hitung dengan Z tabel. Pengujian Uji Normalitas yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik pengujian *Kolmogorov-Sminow* memberikan hasil bahwa data secara pengujian *Kolmogorov-Sminow* dapat dikatakan normal. Hal tersebut dapat diketahui dari angka signifikansi sebesar $0,200 > 0,05$ artinya nilai signifikansi lebih besar dari 0,005.

Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian Multikolinearitas bisa diketahui dari Nilai Toleransi $> 0,100$ dan Nilai VIF $< 10,00$ artinya tidak terjadi gejala multikolinearitas. Pengujian ini dijalankan guna mengetahui apakah ditemukan korelasi antara variabel terikat atau tidak. Berdasarkan pengujian Uji Multikolinearitas yang dilakukan oleh peneliti diperoleh hasil bahwa ukuran tolerance pada Pajak Daerah sebesar $0,420 > 0,100$ dan Nilai VIF $2,381 < 10,00$ artinya variabel Pajak Daerah bebas dari multikolenieritas. Nilai Toleransi Retribusi Daerah $0,310 > 0,100$ dan Nilai VIF $3,228 < 10,00$ artinya variabel Retribusi Daerah bebas multikolinearitas. Jumlah Penduduk mempunyai nilai toleransi sebesar $0,518 > 0,100$ dan Nilai VIF sebesar $1,929 < 10,00$ artinya Jumlah Penduduk bebas multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan. Untuk menguji hasil uji heteroskedastisitas, nilai sig yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas. Dalam observasi ini, uji Glejser digunakan untuk mengetahui apakah terjadi heteroskedastisitas.

Menurut hasil dari pengujian Uji Heterokedastisitas yang sudah dilakukan oleh peneliti bisa dilihat bahwa semua ukuran signifikansi setiap variabel lebih dari 0,05. Pajak Daerah bernilai signifikansi $0,120 > 0,05$, Retribusi Daerah $0,318 > 0,05$ dan Jumlah Penduduk bernilai signifikansi sebesar $0,540 > 0,05$ artinya masing-masing variabel dalam observasi tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

Uji Autokolerasi

Tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar kesalahan penggunaan masa t dan kesalahan masa t-1 (sebelum) dalam regresi linier. Pengujian Autokolerasi digarap dengan melakukan uji *Durbin Watson* memakai kriteria $du < dw < 4-du$ artinya tidak terjadi gejala autokolerasi.

Hasil dari uji Autokolerasi yang sudah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa hasil dari nilai dw sebesar 2,124. Nilai ini terletak pada (dl) 1,6410 dan (du) 1,7488. Apabila $4-du = 2,2512$ maka $du < dw < 4-du = 1,7488 < 2,124 < 2,2512$ artinya tidak ada autokolerasi karena karena nilai 4-du terletak antara du sampai dengan (4-du).

Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda digarap untuk menganalisis dampak atau kaitan linier antara dua atau lebih variabel bebas dengan satu variabel terikat. Hasil dari pengujian analisis regresi linier berganda dapat ditarik persamaan $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$, maka $Y = 3.626 + 0,425 X_1 + 0.228 X_2 + 0.148 X_3$.

1. Nilai Konstanta 3,626 menunjukkan bahwa ketika X_1 , X_2 dan X_3 bernilai 0, maka Y akan meningkat sebesar 3,626.
2. Nilai koefisien X_1 sebesar 0,425 menunjukkan jika X_1 meningkat 1% maka PAD juga mengalami peningkatan sebesar 0,425%.
3. Nilai Koefisien X_2 sebesar 0,228 menunjukkan jika X_2 meningkat 1% maka PAD juga mengalami peningkatan sebesar 0,228%.
4. Nilai koefisien X_3 sebesar 0,128 menunjukkan jika X_3 meningkat 1% maka PAD juga mengalami peningkatan sebesar 0,128%

Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) dimanfaatkan dalam analisis regresi guna menentukan akurasi tertinggi. Peneliti telah melakukan pengujian koefisien determinasi (R^2) dengan hasil taraf Adjust R^2 senilai 0,926 atau 92% maka variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Jumlah Penduduk dapat menjelaskan variabel Pendapatan Asli Daerah senilai 92,6% dan 7,4% dapat diakibatkan oleh variabel lain selain dari faktor dalam observasi.

Uji Parsial (Uji t)

Variabel terikat lainnya diasumsikan konstan untuk melakukan uji Parsial (uji t-statistik) untuk menentukan signifikansi Parsial variabel terikat relatif terhadap variabel bebas. [11] Jika nilai t hitung $> t$ tabel artinya variabel terikat (X) secara Parsial memberikan pengaruh terhadap variabel bebas (Y).

Pengujian yang sudah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan Uji Parsial (t) dapat dilihat bahwa hasil $H_1 = 0,000$, $H_2 = 0,000$, $H_3 = 0,000$ masing-masing hipotesis memiliki nilai dibawah 0,05 artinya H ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian variabel X_1 , X_2 dan X_3 memiliki dampak signifikan terhadap PAD. Uji parsial (uji t) ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas (independen) secara mandiri terhadap variabel terikat (dependen).

Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh factor-factor yang berbeda dalam suatu model memberikan pengaruh terhadap variabel bebas. F Hasil perhitungan ini dibandingkan dengan F tabel yang diperoleh dengan memakai tingkat risiko atau signifikansi 5%.

Hasil dari pengujian Uji Simultan (Uji F) yang sudah dilakukan oleh peneliti bisa diketahui bahwa $H_4=0,000$ artinya nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H_0 diterima. Nilai F hitung sebesar 473,805 dan nilai F tabel sebesar 2,69 didapatkan dengan memakai rumus Uji F = $F(K;N-K)$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel dalam observasi ini saling berpegaruh dengan dampak yang signifikan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut PP Provinsi Jawa Timur No 9 tahun 2010 tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa Pajak Daerah merupakan luran masyarakat yang diwajibkan oleh undang-undang, tanpa mendapat imbalan secara langsung, dan dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat guna kemakmuran bersama. Hipotesis pertama menunjukkan bahwa Pajak Daerah mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa jika pegawai pemerintah daerah dapat secara optimal menerima seluruh Pajak Daerah yang terbagi atas 11 jenis pajak, maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat. Instansi daerah harus meningkatkan penerimaan Pajak Daerah melalui sosialisasi, serta pelayanan dan observasi, guna menaikkan tingkat awal penerimaan daerah. Diketahui dari pengujian yang telah digarap nilai Pajak Daerah sebesar $0,000 < 0,05$ dengan Nilai t hitung $16.350 > 1.98157$. Artinya secara Parsial Pajak Daerah berdampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Observasi ini selaras dengan observasi [4] dan [10] yang menemukan bahwa penerimaan Pajak Daerah secara signifikan positif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Retribusi merupakan tarikan dari daerah sebagai imbalan akan pelayanan atau penerbitan persetujuan tertentu yang secara eksklusif diterbitkan oleh pemerintah negara bagian untuk kebutuhan masyarakat. Diketahui dari pengujian yang telah digarap nilai Retribusi Daerah sebesar $0,000 < 0,05$ dengan Nilai t hitung $>$ dari nilai T tabel, yaitu $5,502 > 1.98157$ artinya secara Parsial Retribusi Daerah berdampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini sesuai dengan observasi yang digarap oleh Pendapatan Asli Daerah. Hal yang sama juga dikemukakan oleh [1] dalam observasinya menghasilkan Retribusi Daerah berperan penting dalam Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut BPS (2013) Penduduk adalah keseluruhan orang yang berkedudukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang enam bulan atau lebih. atau orang yang bertempat di Indonesia kurang dari enam bulan tetapi berencana untuk tinggal di Indonesia. Diketahui dari pengujian yang telah digarap nilai Jumlah Penduduk sebesar $0,000 < 0,05$ dengan Nilai t Hitung diperoleh sebesar 4,643 sehingga kurang dari t tabel yang bernilai 1,98157. Artinya Jumlah Penduduk secara Parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk kabupaten/kota di Jawa Timur mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2018 hingga 2020. Banyaknya Jumlah Penduduk mempengaruhi terpeliharanya Pendapatan Asli Daerah. Ketika Jumlah Penduduk mengalami kemerosotan maka Pendapatan Asli Daerah juga merosot, dan sebaliknya. Hasil ini selaras dengan observasi yang digarap oleh [7] yang menemukan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah

Jika nilai sig $< 0,05$ atau F hitung $>$ F tabel maka hipotesis diterima. Artinya model observasi sudah tepat karena sudah mampu memprediksi nilai variabel. Apabila nilai sig. $> 0,05$ kurang dari atau sama dengan 0,05 atau F hitung $>$ F tabel sehingga hipotesis ditolak, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai variabel dengan model observasi. Pada tabel 9 diperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dengan nilai F hitung sebesar 473.805 dan nilai F tabel sebesar 2,69 sehingga F hitung $>$ F Tabel. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model yang digunakan sudah layak sebagai alat analisa. Secara Simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Jumlah Penduduk memberikan pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah digarap oleh peneliti didapatkan hasil bahwa baik secara Parsial Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Jumlah Penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur. Begitupun dengan hasil yang diperoleh dari Uji Simultan atau secara bersama-sama Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Jumlah Penduduk secara Simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah daerah perlu lebih fokus pada perkembangan Pendapatan Asli Daerah, baik melalui Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah. Selain itu, pertumbuhan penduduk juga harus diperhatikan, karena pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi pendapatan daerah. Selain itu, perlu adanya sosialisasi tentang potensi di Provinsi Jawa Timur yang dapat berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah kepada masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat dapat

bekerja sama dengan pemerintah daerah guna mengembangkan Pendapatan Asli Daerah serta guna mendorong investor untuk melakukan investasi pada infrastruktur milik Provinsi Jawa Timur.

Penulis mengerti bahwa observasi ini masih memiliki banyak kekurangan. Dari segi pembahasan hanya tiga variabel yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk, serta batasan tahun studi yang hanya tiga tahun. Oleh karena itu, observasi yang lebih besar diperlukan karena hasil yang berbeda dapat diperoleh ketika digarap di wilayah lain di Indonesia. Diharapkan peneliti lain dapat menambahkan variabel bebas sehingga dimungkinkan ada variabel lain yang mempengaruhi variabel terikat yang sudah ada saat ini. Selain itu, apabila akan memakai variabel Jumlah Penduduk disarankan Jumlah Penduduk diklasifikasikan berdasarkan usia kerja masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan hasil yang berbeda dari observasi yang digarap oleh peneliti.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] Agusta, R. (2020). Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 4(1), 33-41.
- [2] Badan Pusat Statistik (BPS) diakses dari <https://www.bps.go.id/> diakses pada tanggal 26 April 2022 pukul 20.25
- [3] Baldric Siregar. 2015. Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua). Edisi Pertama. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- [4] Budiman, A. I., Ermadiani and Ubaidillah (2021) 'Peran Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim', *Akuntabilitas*, 15(2), pp. 329–348.
- [5] Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan diakses dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/> diakses pada tanggal 6 Juni 2022 pukul 08.15
- [6] Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan diakses dari <http://ditjenpp.kemkumham.go.id> pada tanggal 10 November 2021 pukul 22.13
- [7] Lestari, D. P., & Hariani, S. (2020). Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Dan Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis*, 3(2), 77-84.
- [8] Mauri, A. P., Mattalatta, M., & Tamsah, H. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Soppeng. *Jurnal Mirai Management*, 2(1), 175-19
- [9] Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta : Edisi Revisi. Penerbit Cv Andi Offser
- [10] Menaung, A. (2018) 'Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kepulauan Sangihe', *Ilmiah Ekbank*, 1(1), pp. 1–8.
- [11] Peraturan BPK diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id> pada tanggal 10 November 2021 pukul 21.39.
- [12] Sujarweni, V. Wiratna. 2014. Metode Observasi: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.